



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)
UNIT KERJA : BIRO MANAJEMEN RISIKO KEPATUHAN DAN TATA KELOLA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARINTO WICAKSONO
2. Jabatan : KEPALA BIRO
3. NHK : 425756

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 8.030.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 92 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 315.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 163 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.315.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 234 m2/152 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.400.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 490.000.000

1. MOBIL, HONDA ALL NEW ACCORD SEDAN Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 150.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 200.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 8.870.000.000

III. HUTANG Rp. 3.890.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.980.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.